

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KENAIKAN TARIF PARKIR DAN JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK DI JAKARTA

Randhito Satrio Harminto¹ dan Leksmono Suryo Putranto²

¹Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta
Randhito.325190087@stu.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta
leksmonop@ft.untar.ac.id

Masuk: 09-07-2023, revisi: 29-07-2023, diterima untuk diterbitkan: 01-08-2023

ABSTRACT

The need for travel for residents of DKI Jakarta and the surrounding area to carry out activities is very high. However, this need is not matched by road growth, causing congestion on several roads. The Provincial Government of DKI Jakarta has taken various ways to deal with this traffic jam, for example by making regulations on the odd-even system. The odd-even system, which can only be passed by the road if the car's license plate number is odd or even, directs people to use public transportation. Electronic Road Pricing (JBE) or Electronic Road Pricing (ERP) has been used to reduce traffic in metropolitan cities. JBE and the policy of increasing parking rates are expected to be able to control volume and obtain funds to build public transportation. Knowing the effect of increasing parking rates in Jakarta on the implementation of JBE in Jakarta. In this study, a survey method will be used using a questionnaire as a research instrument which will be distributed to people who use public and private rental transportation and fellow drivers, or both. And use the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) application to test normality, test validity and test reliability.

Keywords: Electronic Paid Road, Increase in Parking Fees, public opinion, users of public and private transportation.

ABSTRAK

Kebutuhan perjalanan penduduk DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya untuk melakukan aktivitas sangat tinggi. Namun, kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalannya, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan di beberapa ruas jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan berbagai macam cara untuk menangani kemacetan ini misalnya dengan cara membuat peraturan sistem ganjil-genap. Sistem ganjil-genap yang hanya bisa dilewati jalan tersebut jika nomor polisi mobil tersebut ganjil atau genap, mengarahkan masyarakat menggunakan kendaraan umum, Jalan Berbayar Elektronik (JBE) atau *Electronic Road Pricing* (ERP) telah digunakan untuk mengurangi lalu lintas di kota-kota metropolitan Dampak Kenaikan Tarif Parkir Pada Revisi Pergub31/2017 Terhadap Percepatan Penerapan JBE di Jakarta. JBE dan Kebijakan kenaikan tarif parkir diharapkan bisa menjadi pengendali volume dan mendapatkan dana untuk bangun public transport. Mengetahui pengaruh kenaikan tarif parkir di Jakarta terhadap penerapan JBE di Jakarta. Pada penelitian ini, akan digunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian yang akan disebarakan kepada masyarakat yang menggunakan transportasi umum dan pribadi sewa dan sesama pengendara, atau keduanya. Dan menggunakan aplikasi Statistical Package for Social Sciences (SPSS) untuk menguji normalitas, Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

Kata kunci: Jalan Berbayar Elektronik, Kenaikan Tarif Parkir, pandangan masyarakat, pengguna transportasi umum dan pribadi.

1. PENDAHULUAN

Pemprov DKI Jakarta telah menggunakan berbagai langkah untuk mencegah kemacetan. Salah satunya menerapkan sistem ganjil genap. Sistem ganjil genap memungkinkan kendaraan melewati jalan tertentu hanya jika nomor platnya ganjil atau genap, sehingga mendorong penggunaan angkutan umum. Jalan berbayar elektronik telah diterapkan untuk mencegah kemacetan lalu lintas di kota-kota. Sistem ERP berguna untuk kemacetan dengan melakukan survey serta analisa implementasi yang digunakan. Penghasilan dari implementasi ERP berguna untuk mengembangkan lalu lintas jalan dan. Sistem JBE adalah kebijakan yang memberlakukan tol pada suatu ruas jalan bagi setiap kendaraan yang melewatinya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengurangi kemacetan dengan cara menagih pengguna kendaraan pribadi pada jam sibuk. Dengan demikian,

pengguna kendaraan harus memutuskan apakah akan tetap melewati kawasan tersebut atau memilih beralih ke angkutan umum atau jalur alternative

Salah satu kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Daerah DKI Jakarta yaitu kebijakan menaikkan tarif parkir (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor, 2017). Kebijakan ini diterapkan guna untuk mengalihkan masyarakat pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum untuk mengurangi volume kendaraan yang beredar di jalan-jalan di DKI Jakarta, sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan. Kebijakan kenaikan tarif parkir yang mahal ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan bagi para pengendara kendaraan pribadi untuk setidaknya mengurangi frekuensi penggunaan pribadi.. Di sisi lain JBE dan Kebijakan kenaikan tarif parkir diharapkan bisa menjadi pengendali volume dan mendapatkan dana untuk bangun *public transport*.

Berdasarkan latar belakang, jurnal ini akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi respon masyarakat terhadap kebijakan JBE yang akan diterapkan di beberapa titik di Jakarta.
2. Mengevaluasi respon masyarakat terhadap revisi Pergub nomor 31 tahun 2017 tentang kenaikan tarif parkir di kawasan Jakarta.
3. Mengidentifikasi apakah kenaikan tarif parkir dalam revisi Pergub nomor 31 tahun 2017 mendukung skema penerapan JBE di Jakarta.
4. Mengidentifikasi apakah kenaikan tarif parkir dan kebijakan jalan berbayar elektronik dapat mencegah terjadinya kemacetan di Kawasan Jakarta.

Berdasarkan rumusan masalah, maka berikut merupakan tujuan penelitian jurnal:

1. Mengetahui respon masyarakat terhadap kebijakan JBE yang akan diterapkan di Jakarta.
2. Mengetahui respon masyarakat terhadap revisi Pergub nomor 31 tahun 2017 tentang kenaikan tarif parkir di Jakarta.
3. Mengetahui pengaruh kenaikan tarif parkir di Jakarta terhadap penerapan JBE di Jakarta.

Kebijakan Kenaikan Tarif Parkir

Kemacetan adalah turunnya tingkat kelancaran arus lalu lintas pada jalan yang ada, dan sangat mempengaruhi para pelaku perjalanan, baik yang menggunakan angkutan umum maupun angkutan pribadi, hal ini berdampak pada ketidaknyamanan (Margareth, Franklin, & Warouw, 2015). Analisis kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di semua tingkatan pemerintahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan kenaikan tarif parkir ini menyebabkan kemacetan menjadi masalah besar bagi masyarakat. Analisis politik yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta menyebabkan rencana penerapan perda ini. Pemerintah DKI Jakarta dipaksa untuk mengambil tindakan yang tidak populer dan dapat menyebabkan konflik karena kemacetan dan lalu lintas yang padat.

Jalan Berbayar Elektronik/JBE

Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (2016), jalan berbayar elektronik diterapkan secara elektronik pada area dan jalur tertentu bagi kendaraan yang melewatinya. Electronic Road Pricing (ERP) adalah sebuah sistem di luar negeri yang digunakan untuk membatasi lalu lintas dengan mengenakan biaya untuk pengendalian lalu lintas (Putra, 2020). Sistem ini berasal dari manajemen permintaan perjalanan, juga dikenal sebagai manajemen permintaan transportasi. Pembatasan lalu lintas dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas, dalam di luar negeri dikenal dengan istilah *Electronic Road Pricing* (ERP) (Mustakim, 2016). *Electronic Road Pricing* (ERP) merupakan suatu sistem yang dikembangkan untuk pembatasan kendaraan pribadi yang merupakan turunan dari manajemen permintaan perjalanan (transport demand management). ERP atau dikenal sebagai *Congestion Charging* adalah suatu metode pengendalian lalu lintas secara elektronik, yang bertujuan untuk mengurangi permintaan pengguna jalan sampai kepada suatu titik dimana permintaan penggunaan jalan tidak lagi melampaui kapasitas jalan.

Manfaat dan Dampak Jalan Berbayar Elektronik (JBE)

Menurut Putra (2020), manfaat Jalan Berbayar Elektronik, yaitu:

1. Pemerintah akan melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menurunkan tingkat kemacetan;
 - b. Meningkatkan pendapatan sektor lalu lintas baru;
 - c. Mengubah moda transportasi kendaraan; dan
 - d. Menambah efektivitas dan penghematan manajemen permintaan.
2. Pengendara:

- a. Lalu lintas yang nyaman
 - b. Lalu lintas yang ditempuh tepat waktu
 - c. Meningkatkan keinginan pengendara berpindah ke angkutan umum
 - d. Transaksi lebih efektif
3. Masyarakat:
- a. Mengurangi polusi asap kendaraan;
 - b. Mengurangi kebisingan yang disebabkan oleh penggunaan angkutan umum; dan
 - c. Mengurangi kerugian finansial yang disebabkan oleh kemacetan lalu lintas.

Kemudahan transportasi, seperti lalu lintas yang lancar, mengurangi waktu tempuh dan biaya perjalanan.

1. Diharapkan perubahan lingkungan akan mengurangi polusi udara, bunyi, dan getaran. 2. Dengan peningkatan ekonomi, ERP diharapkan dapat memberi pemerintah lebih banyak uang untuk meningkatkan kualitas angkutan umum.
2. Diharapkan bahwa ERP bermanfaat kepada pengguna jalan dan diharapkan juga akan ada jaminan untuk pejalan kaki dan penduduk lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam makalah ini memiliki tahapan sebagai berikut:

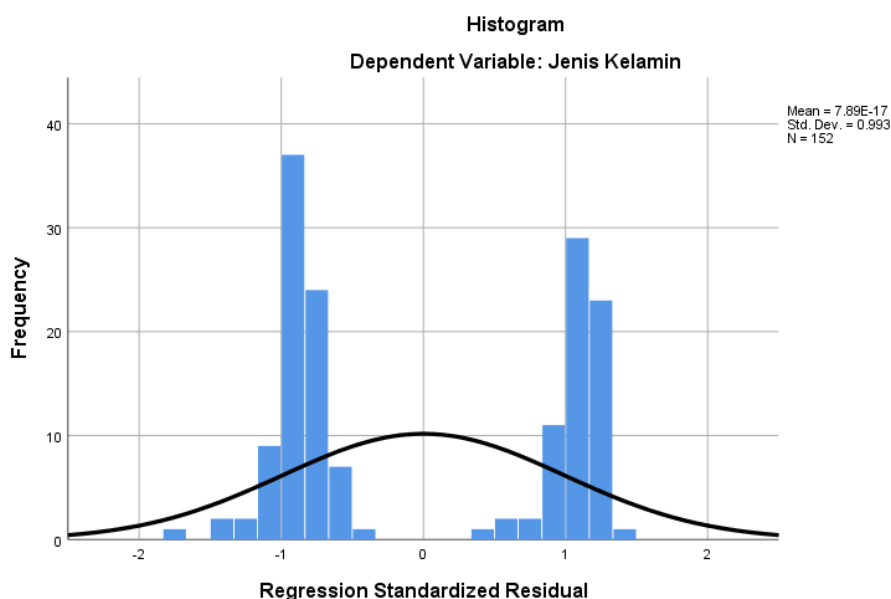
1. Studi Literatur = melakukan tahap studi literatur melalui jurnal dan buku
2. Identifikasi masalah, penetaan rumusan masalah dan tujuan = respon masyarakat terhadap jalan berbayar elektronik dan kenaikan tarif parkir
3. Menggunakan metode kuisioner = memakai serangkaian pertanyaan untuk manjaring data dan informasi dari responden
4. Uji Normalitas. Uji Validitas dan Uji Realibilitas = mengetahui apakah pertanyaan valid, reliabel, dan normal
5. Pembahasan Hasil Analisis = menggunakan analisis *one sample test* dan *Independent Sample T-Test*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

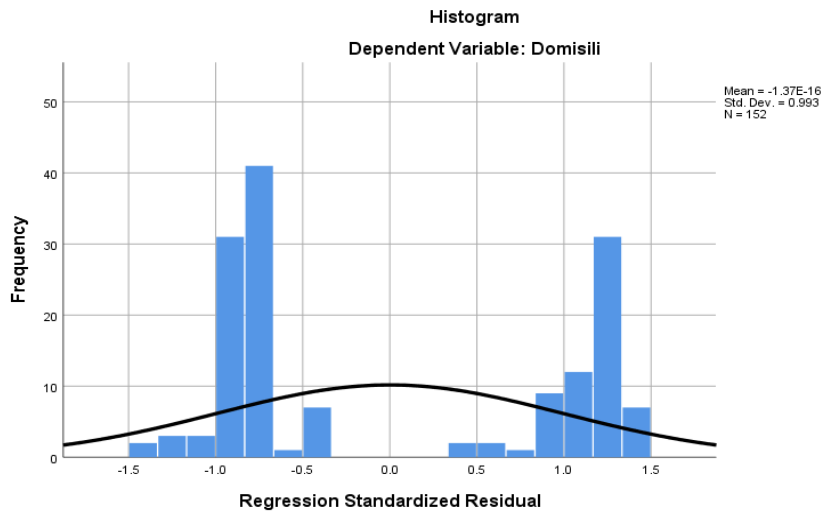
Uji Normalitas dilakukan dengan metode *Normal Probability Plot*. Berikut ini hasil dari uji normalitas dengan 152 responden dengan metode *Normal Probability Plot*.

Histogram Normal Probability Plot



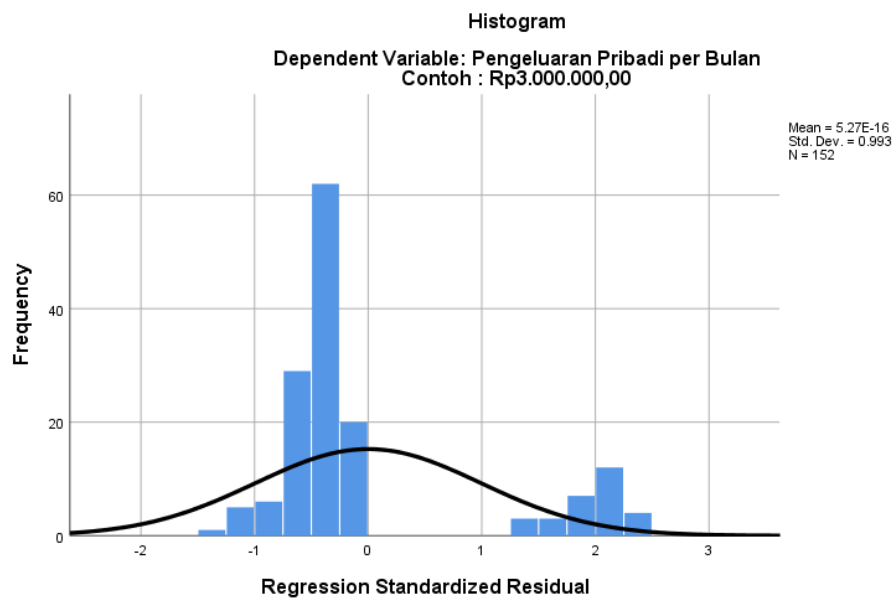
Gambar 1. Grafik *Normal Probability Plot* variable Jenis kelamin

Berdasarkan hasil grafik gambar 1 normalitas variable jenis kelamin diatas didapatkan normalitas data yang tidak normal karena nilai mendekati nol.



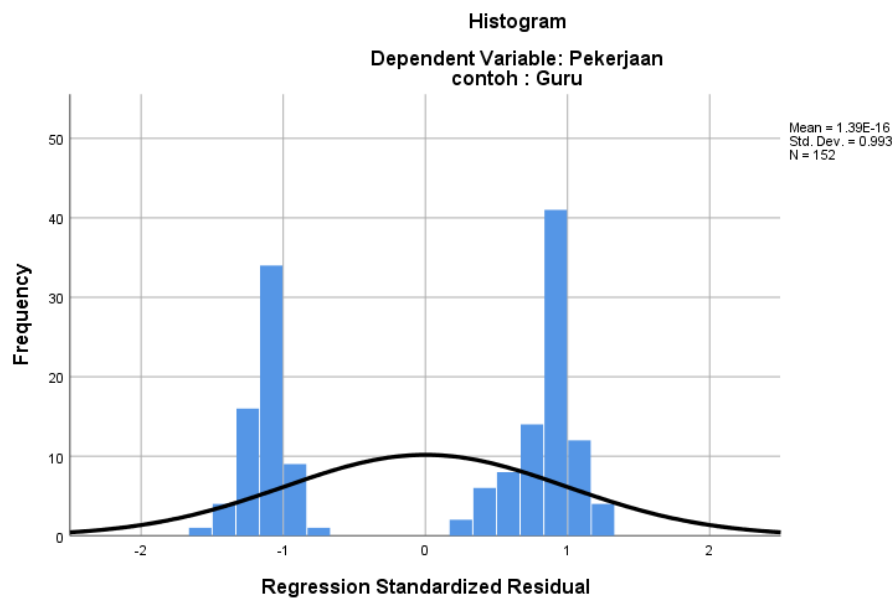
Gambar 2. Grafik *Normal Probability Plot* variable Domisili

Berdasarkan hasil grafik gambar 2 normalitas variable domisili diatas didapatkan normalitas data yang tidak normal karena nilai mendekati nol.



Gambar 3. Grafik *Normal Probability Plot* variable Pengeluaran

Berdasarkan hasil grafik gambar 3 normalitas variable pengeluaran diatas didapatkan normalitas data yang tidak normal karena nilai mendekati nol.

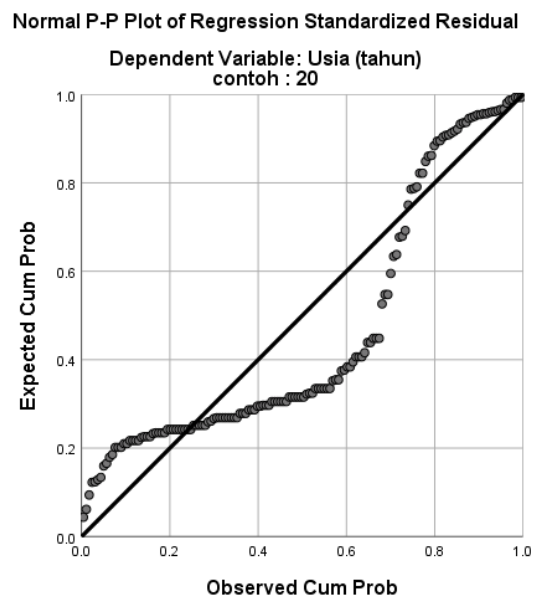


Gambar 4 Grafik *Normal Probability Plot* variable Pekerjaan

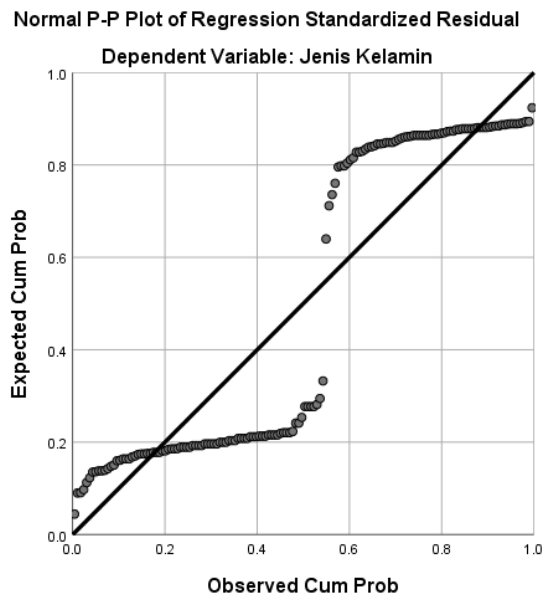
Berdasarkan hasil grafik gambar 4 normalitas variable pekerjaan diatas didapatkan normalitas data yang tidak normal karena nilai mendekati nol.

Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan hasil grafik gambar 5 normalitas variable usia diatas didapatkan normalitas data yang normal karena data terbagi dengan rata.

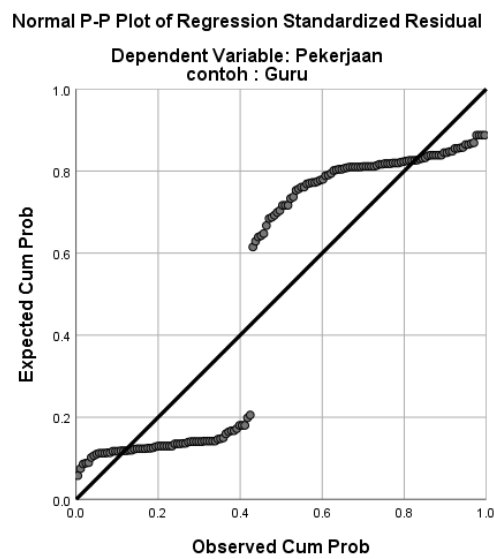


Gambar 5. Grafik *Normal P-P Plot* variable Usia



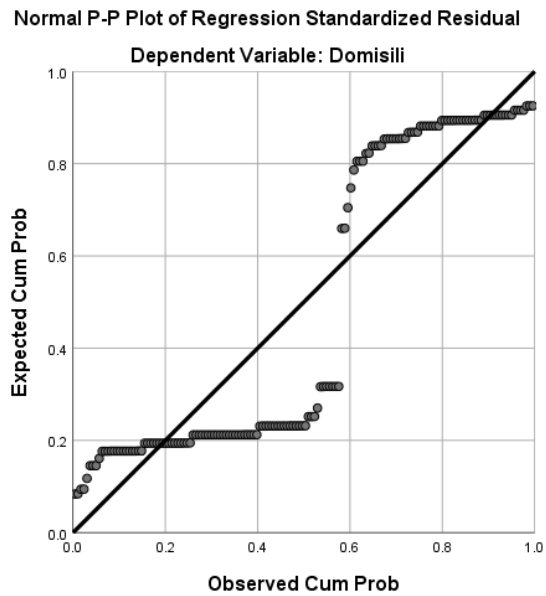
Gambar 6. Grafik *Normal P-P Plot* variable jenis kelamin

Berdasarkan hasil grafik gambar 6 normalitas variable jenis kelamin diatas didapatkan normalitas data yang tidak normal karena nilai mendekati nol.



Gambar 7. Grafik *Normal P-P Plot* variable pekerjaan

Berdasarkan hasil grafik gambar 7 normalitas variable pekerjaan diatas didapatkan normalitas data yang tidak normal karena nilai mendekati nol.



Gambar 8. Grafik *Normal P-P Plot* variable domisili

Berdasarkan hasil grafik gambar 8 normalitas variable domisili diatas didapatkan normalitas data yang tidak normal karena nilai mendekati nol.

Analisis Metode One Sample T-Test

Hasil uji metode analisis *One Sample T-Test* dari 152 responden yang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum di Jakarta.

Tabel 1. Hasil Uji Metode Analisis *One Sample T-Test*

Pertanyaan	Nilai Rataan	Selisih Mean	Simpangan Baku	α	Signifikan pada $\alpha \leq 0,005$ (Ya/Tidak)
Kenaikan tarif parkir di Pergub No.37 thn 2017	3,28	0.756	0.78	<0,001	Ya
Presepsi Jalan berbayar elektronik di jakarta	3,37	1,03	0,672	<0,001	Ya

Berdasarkan hasil tabel 1 diatas pertanyaan mengenai kenaikan tarif parkir di Pergub No.37 thn 2017 memiliki nilai rataan yang berada di atas 2,5 yang menandakan bahwa responden setuju dengan adanya kenaikan tarif parkir guna mencegah terjadinya kemacetan . Berdasarkan pengujian dengan metode *One Sample T-Test* didapatkan hasil untuk setiap indikator mendapatkan nilai α lebih kecil dari 0,001 yang berarti semua indikator tersebut signifikan.

Metode Independent Sample T-Test

Berikut ini adalah hasil dari uji metode analisis *One Sample T-Test* dari 152 responden yang menggunakan transportasi umum maupun pribadi di Jakarta.

Tabel 2 Hasil Uji Selisih Rataan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	N	Nilai Selisih Rataan	
		Kenaikan tarif parkir di Pergub No.37 thn 2017	Presepsi Jalan berbayar elektronik di jakarta
Pria	83	3,24	3.563
Wanita	69	3.175	3.42
Selisih Rataan		0,146	0,133
Tingkat Signifikasi		0,375	0,41
Signifikasi? (Ya/Tidak)		Tidak	Tidak

Dari tabel 2 di atas, telah dilakukan uji *Independent Sample T-Test*. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara pria dan wanita terhadap penggunaan transportasi umum maupun pribadi dengan nilai signifikansi $>0,05$.

Tabel 3 Hasil Uji Selisih Rataan Usia

Usia	N	Nilai Selisih Rataan	
		Kenaikan tarif parkir di Pergub No.37 thn 2017	Presepsi Jalan berbayar elektronik di jakarta
<29 Tahun	106	3,32	3,466
>29 Tahun	46	3.16	3,248
Selisih Rataan		0.319	0,32
Tingkat Signifikasi		0,221	0,26
Signifikasi? (Ya/Tidak)		Tidak	Tidak

Dari tabel 3 di atas, telah dilakukan uji *Independent Sample T-Test*. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara responden berusia <29 tahun dan >29 tahun terhadap penggunaan transportasi umum maupun pribadi dengan nilai signifikansi $>0,05$.

Tabel 4. Hasil Uji Selisih Rataan Domisili

Domisili	N	Nilai Selisih Rataan	
		Kenaikan tarif parkir di Pergub No.37 thn 2017	Presepsi Jalan berbayar elektronik di jakarta
Jakarta	88	3,655	3,416
Diluar Jakarta	64	3,55	3.64
Selisih Rataan		0,149	0.11
Tingkat Signifikasi		0,333	0,3
Signifikasi? (Ya/Tidak)		Tidak	Tidak

Dari tabel 4 di atas, telah dilakukan uji *Independent Sample T-Test*. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara responden berdomisili di Jakarta dan diluar jakarta terhadap penggunaan transportasi umum maupun pribadi dengan nilai signifikasi >0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Selisih Rataan Pekerjaan

Penggunaan	N	Nilai Selisih Rataan	
		Kenaikan tarif parkir di Pergub No.37 thn 2017	Presepsi Jalan berbayar elektronik di jakarta
Mahasiswa	65	3,32	3,45
Pekerjaan lain	87	3,16	3,58
Selisih Rataan		0.135	0.14
Tingkat Signifikasi		0.252	0,33
Signifikasi? (Ya/Tidak)		Tidak	Tidak

Dari tabel 5 di atas, telah dilakukan uji *Independent Sample T-Test*. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa dan pekerjaan lain, terhadap penggunaan transportasi umum maupun pribadi dengan nilai signifikasi >0,05.

Tabel 6 Hasil Uji Selisih Rataan Pengeluaran

Pengeluaran	N	Nilai Selisih Rataan	
		Kenaikan tarif parkir di Pergub No.37 thn 2017	Presepsi Jalan berbayar elektronik di jakarta
< Rp. 4.200.0000 perbulan	123	3,57	3,58
> Rp. 4.200.0000 perbulan	29	3,25	3,41
Selisih Rataan		0.124	0.14
Tingkat Signifikasi		0,355	0,348
Signifikasi? (Ya/Tidak)		Tidak	Tidak

Dari tabel 6 di atas, telah dilakukan uji *Independent Sample T-Test*. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara responden dengan pengeluaran <Rp 4.200.000 perbulan dan >Rp.4.200.000 perbulan terhadap penggunaan transportasi umum maupun pribadi dengan nilai signifikasi >0,05.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis sebelumnya mencapai kesimpulan berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis *One Sample T-Test*, diketahui bahwa secara garis besar responden setuju bahwa kenaikan Tarif Palkir dan JBE dapat mencegah kemacetan di Jakarta. Nilai rataan tertinggi adalah respon masyarakat terhadap kenaikan tarif parkir di jakarta, sedangkan nilai rataan terendah adalah respon masyarakat terhadap jalan berbayar elektronik di Jakarta
2. Berdasarkan hasil analisis *Independent Sample T-Test*, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Jenis Kelamin, domisili, dan pekerjaan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap respon masyarakat pengguna transportasi pribadi maupun umum terhadap kenaikan tarif parkir dan JBE dalam mencegah kemacetan di Jakarta.
 - b. Responden yang berdomisili di Jakarta lebih menyetujui adanya kenaikan tarif parkir di Jakarta dan responden yang berdomisili diluar Jakarta lebih menyetujui Jalan berbayar elektronik berguna dalam mencegah kemacetan di Jakarta.
 - c. Responden yang memiliki usia dibawah 29 tahun lebih menyetujui bahwa kenaikan tarif parkir dan JBE dapat mencegah terjadinya kemacetan di Jakarta.

Saran yang dapat diberikan penulis, yakni:

1. Harga pada tarif palkir di penitipan kendaraan seperti stasiun dapat dikurangi ataupun digratiskan agar meningkatkan minat masyarakt untuk menggunakan kendaraan umum seperti kereta.
2. Untuk penelitian selanjutnya penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Margareth, M., Franklin, P. J., & Warouw, F. (2015). rmsl,+Melisa_89-97. *Studi Kemacetan Lalu Lintas Di Pusat Kota Ratahan*, 2.
- Mustakim. (2016). JURNAL ILMU DAN BUDAYA| 8007PENGENDALIAN LALU LINTAS JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK: STUDI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 149 TAHUN 2016. *Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik : Suatu Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 149 Tahun 2016*, 3.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 149 Tahun 2016 tentang pengendalian Lalu lintas Jalan Berbayar Elektronik. (2016). Jakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor. (2017). DKI Jakarta.
Putra, A. S. (2020). Jurnal Informatika Universitas Pamulang. *Penerapan Konsep Kota Pintar dengan Cara Penerapan ERP (Electronic Road Price) di Jalan Ibu Kota DKI Jakarta*, 13.

